

**LAPORAN KEGIATAN
TIM POKJA PENGUATAN PENGAWASAN
TAHUN 2017**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional memiliki karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Wujud reformasi birokrasi adalah melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pada aspek kelembagaan, aspek tata laksana, dan aspek sumber daya manusia aparatur.

Menyikapi hal tersebut, maka reformasi birokrasi yang telah berlangsung selama ini harus tetap didukung dengan komitmen dan konsisten segenap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Dalam konteks di atas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melaksanakan reformasi birokrasi sebagaimana telah dicanangkan pemerintah. Dalam hal ini, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk mendukung tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Namun demikian, pada kenyataannya hasil yang diperoleh belum optimal. Oleh karenanya, perlu ada perbaikan dan peningkatan dalam kerangka implementasi reformasi birokrasi di BKN. Salah satunya melakukan kegiatan penguatan pengawasan yang menjadi salah satu area perubahan yang telah dicanangkan dalam *Road Map Reformasi Birokrasi BKN*.

B. Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang rencana-rencana kerja dan capaian-capaian pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya kelompok kerja penguatan pengawasan selama tahun 2017. Laporan ini juga disusun untuk penilaian kemajuan pelaksanaan RB BKN oleh KemenPAN RB yang dilakukan secara berkala.

II
PENGUATAN PENGAWASAN

A. Program Kerja Tahun 2017

Dalam rangka menunjang kegiatan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh BKN, Tim Program Kerja Penguatan Pengawasan mengagendakan sejumlah kegiatan pada tahun 2017. Kegiatan Program Kerja Penguatan Pengawasan tahun 2017 meliputi :

1. Pengelolaan Gratifikasi;
2. Penerapan SPIP;
3. Pengaduan Masyarakat;
4. Pembangunan *Whistle Blower System*;
5. Penerapan Benturan Kepentingan, dan;
6. Pembangunan Zona Integritas.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Gratifikasi												
	1. Melakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi												
	2. Menindaklanjuti evaluasi atas penanganan gratifikasi												
2.	Penerapan SPIP												
	1. Melakukan pemantauan atas lingkungan pengendalian												
	2. Melakukan evaluasi penilaian resiko atas organisasi												

No.	Kegiatan		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	3.	Melakukan evaluasi atas kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi												
3.	Pengaduan Masyarakat													
	1.	Melakukan evaluasi atas kebijakan pengaduan masyarakat												
4.	Whistle Blowing System													
	1.	Pembangunan aplikasi whsistle blowing system yang terintegrasi												
	2.	Pengimplementasian whistle blowing system yang terintegrasi												
5.	Penerapan Benturan Kepentingan													
	1.	Membuat SOP terkait dengan penanganan benturan kepentingan												
6.	Pembangunan Zona Integritas													
	1.	Memantau tindak lanjut atas evaluasi terhadap zona integritas yang telah ditentukan												
	2.	Menetapkan unit kerja untuk menjadi WBK / WBBM												

B. Capaian Program Kerja Tahun 2017

Dalam pelaksanaan program kerja diatas dapat dilaporkan capaian-capaian sebagai berikut :

No.	Penilaian	Dokumen
1.	Gratifikasi	
1.	Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi	PERKA BKN Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BKN
2.	Telah dilakukan public campaign	Foto/dokumentasi data Tahun 2015
3.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Pada pelaksanaan Tahun 2017 tidak terdapat laporan mengenai gratifikasi
4.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	
5.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	
2.	Penerapan SPIP	
1.	Telah terdapat peraturan Pimpinan Organisasi tentang SPIP	Kepka BKN tentang SPIP
2.	Telah dibangun lingkungan pengendalian	SK SPIP Pusat, Kantor Regional dan Implementasi seluruh unit kerja tahun 2016
3.	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi	Penilaian resiko unit kerja : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Regional IV BKN Makassar (data tahun 2015); 2. Kantor Regional V BKN DKI Jakarta (data tahun 2015); 3. Direktorat Pensiun (data tahun 2015). 4. Direktorat PSIK; 5. Direktorat Wasdal KPPJ; 6. Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian; 7. Direktorat Arsip Kepegawaian II; 8. Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan;
4.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit pelayanan publik BKN telah melaksanakan pengendalian untuk meminimalisir resiko yaitu Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan, data tahun 2016; 2. Prosedur mutu Direktorat Pensiun Tahun

No.	Penilaian	Dokumen
		2016 dan Undangan rapat tinjauan manajemen Tahun 2016 membahas Pengendalian Resiko, Data Tahun 2016; 3. Dokumen ISO dari Kanreg X BKN Denpasar.
5.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	Dokumen sosialisasi SPIP Tahun 2017
6.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	1. LHA Tahun 2017; 2. SP Tim Tindak Lanjut Temuan Inspektorat; 3. Laporan Hasil Tindak Lanjut
3. Pengaduan Masyarakat		
1.	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	PERKA BKN Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Keja BKN
2.	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	1. Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penelasan atas kewenangan pejabat Kepala Daerah dibidang Kepegawaian 2. PERKA BKN nomor 25 Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Tindakan Administratif dan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang Menggunakan Ijazah palsu; 3. Laporan penanganan Pengaduan Tahun 2017 dari E Lapor
3.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Laporan tindaklanjut pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat tahun 2017.
4.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	1. Hasil Rakor Wasdal Tahun 2016 2. Laporan Monev penanganan pengaduan masyarakat 2016
5.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Laporan tindak lanjut monev pengaduan masyarakat
4. Whistle Blowing System		
1.	Telah terdapat Whistle Blowing System	1. PERKA BKN tentang WBS; 2. PERKA KANREG X BKN Denpasar.
2.	Whistle Blowing System telah disosialisasikan	1. Buku Grand Design Sistem Informasi kepegawaian dan Aplikasi Pengawasan Pengendalian Manajemen ASN Bid.

No.	Penilaian		Dokumen
5.			Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemeberhentian dalam Jabatan; 2. Brosur dari Kantor regional X BKN Denpasar.
	3. Whistel Blowing System telah diimplementasikan		Monev Whistle Blowing System pada Kantor Regional X BKN Denpasar Tahun 2017
	4. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System		Monev Whistle Blowing System pada Kantor Regional X BKN Denpasar Tahun 2017
	5. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti		Monev Whistle Blowing System pada Kantor Regional X BKN Denpasar Tahun 2017
	Penerapan Benturan Kepentingan		
6.	1. Telah terdapat penanganan benturan kepentingan		1. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 2/SE/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 tentang penanganan Benturan kepentingan di lingkungan BKN; 2. PERKA KANREG X BKN Denpasar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan kepentingan di Lingkungan Kantor Regional X BKN Denpasar
	2. Penanganan kepentingan benturan telah disosialisasikan		Dokumen sosialisasi penanganan benturan kepentingan (data Tahun 2016)
	3. Penanganan kepentingan benturan telah diimplementasikan		1. Dokumen Tahun 2016 meliputi : - Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan; - Laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan;
	4. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan		2. Laporan pelaksanaan penanganan brnturan kepentingan tahun 2017 dari Inspektorat;
	5. Hasil evaluasi atas penanganan kepentingan benturan telah ditindaklanjuti		3. Laporan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan tahun 2017 dari Kantor Regional X BKN Denpasar;
Pembangunan Zona Integritas			
6.	1. Telah dilakukan pencanangan zona Integritas		KEPKA BKN Nomor 103.1?KEP/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Penetapan Unit Kerja Yang Akan Dibangun Menjadi Zona Integritas di Lingkungan BKN, yaitu :

No.	Penilaian	Dokumen
		1. Kanreg I BKN Yogyakarta; 2. Kanreg VI BKN Medan; 3. Kanreg X BKN Denpasar.
2.	Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas	KEPKA BKN Nomor 118.1/KEP/2015 tanggal 22 Juni Tahun 2015 tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Tahun 2015 dilingkungan BKN, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> 1. Kanreg I BKN Yogyakarta; 2. Kanreg VI BKN Medan; 3. Kanreg X BKN Denpasar; 4. Dit. Pengadaan dan Kepangkatan BKN Pusat; 5. Pusat Pengembangan Sistem Rekruitmen ASN
3.	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor 259/K/ROPEG/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pembangunan Zona Integritas untuk 3 Kanreg
4.	Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	1. Keputusan Kepala BKN Nomor 119.1/KEP/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal dilingkungan BKN; 2. Lembar kerja evaluasi zona integritas untuk 3 Kanreg dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5.	Telah terdapat tuntutan kerja yang ditetapkan sebagai "menuju WBK/WBBM"	Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor 259/K/ROPEG/III/2016 tanggal 18 Maret 2016 tentang Pembangunan Zona Integritas untuk 3 Kanreg
7.	Aparat Pengawas Intern Pemerintah	
1.	Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan	1. Surat Tugas Tim Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit; 2. Laporan Hasil Tindak Lanjut 2017.
2.	APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas	Data APIP/Auditor BKN per 31 desember 2017
3.	APIP didukung dengan anggaran yang memadai	POK 2017, Pagu Rp.1.540.171.000,- DIPA BKN 2017
4.	APIP berfokus pada client dan audit berbasis resiko	Dokumen rencana kegiatan pengawasan tahun 2017

III

PENUTUP

Reformasi birokrasi telah memasuki tahap akhir, dimana banyak program yang telah dicanangkan dan diimplementasikan untuk mewujudkan good governance dan clean government. Namun demikian, pada kenyataannya pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih belum optimal dan belum banyak dirasakan oleh masyarakat luas. Pada beberapa tataran pemerintahan, reformasi birokrasi hanya dianggap sebagai wacana dan masih cukup jauh dari kerangka untuk menumbuhkan profesionalitas aparatur negara dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat luas.

Reformasi birokrasi yang telah berlangsung selama ini harus tetap didukung dengan komitmen dan konsisten segenap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Hal ini agar implementasi reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik serta dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.